

NEGARA HUKUM PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAM MENYINERGIKAN SELURUH KOMPONEN BANGSA UNTUK MENANGGULANGI BENCANA ALAM

Chandra Aldi Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, chandraaldi6@students.unnes.ac.id

Sondang Sijabat

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sondangsijabat@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, tentunya membawa amanat untuk melaksanakan suatu kehidupan berwarga negara yang sejahtera dan berkeadilan. Perlunya adanya sinergi dari seluruh pihak untuk mewujudkannya. Pancasila harus diluhurkan oleh warga negara agar kendala yang terjadi dapat teratasi. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji mengenai (1) Bagaimana negara hukum Pancasila sebagai pedoman dalam menyinergikan seluruh komponen bangsa dan (2) Bagaimana peran nyata seluruh komponen bangsa dalam menanggulangi bencana alam Gempa Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penyampaian secara deskriptif analitik. Kesimpulan dari artikel ini yaitu, (1) Negara hukum Pancasila sangat berperan penting dalam menyinergikan seluruh komponen bangsa untuk menghadapi tantangan yang ada dengan nilai-nilai dan hukum positif yang dimilikinya, (2) Peran nyata seluruh komponen bangsa dilakukan dengan nilai gotong royong Pancasila dengan berpayung hukum kepada UU No. 24 Tahun 2007 agar korban bencana alam Gempa Cianjur terjamin hak-haknya.

Kata Kunci: Pancasila; Negara Hukum; Sinergi; Seluruh Komponen Bangsa; Menanggulangi Bencana Alam.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam penafsiran UUD 1945, Rule of Law adalah negara hukum yang tidak menurut kekuasaan belaka, yang tercermin dalam Amandemen konstitusi, pernyataan maka rule of law adalah negara hukum merupakan nilai yang sangat konstitusional, maka itu dinyatakan. Lanjutan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Perubahan UUD 1945 ini tidak lagi menyebutkan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum, melainkan diterjemahkan menjadi konsep negara hukum. Rule of law adalah struktur yang merupakan instrumen masyarakat untuk mengatur dan membentuk hubungan antara sesama manusia dalam penyelenggaraan wilayah yang bersifat kategoris atau lebih spesifik.

Negara hukum juga merupakan negara di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya, dimana keadilan merupakan salah satu syarat untuk kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian dalam kehidupan warga negara dan dibalik kata keadilan juga merupakan kata kesusilaan atau adab, dan akhlak kepada sesama manusia untuk menciptakan kerukunan, kedamaian dan juga kenyamanan bagi warga negara yang baik. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum mendasarkan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara pada Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia, yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila juga merupakan ideologi negara. merupakan

dasar negara, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu¹:

1. Selaku pedoman hidup bangsa Indonesia, berarti pedoman hidup yang dipercayakan kepada bangsa Indonesia diucap Pancasila. Nilai-nilai yang tercantum dalam peraturan Pancasila berasal dari budaya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, selaku inti nilai budaya bangsa Indonesia, Pancasila bisa dikatakan selaku cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral tersebut setelah itu membagikan orientasi, arah ataupun kekuatan spiritual kepada bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
2. Pancasila selaku jiwa bangsa Indonesia. Bagi von Savigny, tiap bangsa mempunyai jiwnya sendiri-sendiri yang diucap Volkgeist, yang berarti jiwa rakyat ataupun jiwa bangsa. Pancasila selaku jiwa bangsa Indonesia lahir bertepatan dengan bangsa Indonesia itu sendiri ialah bermula era sekarang. Bagi Profesor pak AG Pringgodigdo kalau Pancasila sendiri telah terdapat makna dari bangsa Indonesia, sebab pancasila membagikan corak yang khas pada bangsa Indonesia serta tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia serta ialah karakteristik yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terdapat mentak kalau saban Sila, terlepas dari yang lain, bertabiat umum, yang pula berlaku untuk bangsa-bangsa lain di dunia ini, melainkan lima tatanan yang membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang membedakan bangsa Indonesia;
3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap dan perilaku spiritualnya untuk membedakannya dengan bangsa lain. Pancasila sebagai sumber segala ketertiban; kalau seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hendaklah bersumber dalam Pancasila ataupun tidak berlawanan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam sarana paling jenjang, ialah dalam pembukaan UUD 1945, setelah itu dituangkan ataupun dijabarkan dalam alinea-alinea gagasan pokok yang memiliki atmosfer batin UUD 1945, yang kesimpulannya dimatangkan ataupun diterjemahkan oleh UUD 1945, dan hukum positif yang lain. Tujuan bangsa Indonesia merupakan warga yang adil serta makmur, menyeluruh secara material serta spiritual bersumber pada Pancasila. "Pancasila berlaku seperti pengetahuan hidup serta Bawah tanah tumpah darah" bagi Ronto, guna Pancasila selaku pedoman hidup bangsa, ialah. Pancasila dalam perannya selaku sumber dari seluruh sumber hukum ataupun hukum bawah nasional menjadikan Pancasila selaku tolak ukur dalam memperhitungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum yang diundangkan serta dilaksanakan di Indonesia wajib mencerminkan pemahaman serta rasa keadilan yang cocok dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum Indonesia wajib menjamin, mewujudkan, serta tidak berlawanan dengan perkata Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 serta interpretasinya dalam bacaan UUD 1945;

Dalam perannya selaku sumber seluruh sumber hukum ataupun hukum bawah negeri, pancasila terletak di atas konstitusi, maksudnya pancasila terletak di atas undang-undang bawah 1945. Bila UUD 1945 merupakan konstitusi negeri, hingga UUD Pancasila

¹ Pusdatin. (2021). *Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Begini Penjelasannya*. BPIP RI.

merupakan prinsip negeri (norma bawah negeri). Metode hidup, mensyaratkan kalau kehidupan tiap hari bangsa Indonesia wajib dan cocok dengan petunjuk Pancasila.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam tidak bisa dipisahkan dari Pancasila serta UUD 1945 yang mendasarinya. Nilai-nilai Pancasila digali serta ditemui dari nilai-nilai yang absah meningkat serta hidup dalam warga, ialah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, serta keadilan. Dalam kehidupan berwarga negara nilai-nilai tersebut senantiasa berlaku serta ialah satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan serta mengacu pada satu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali apakah nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Penanggulangan Bencana alam. Hasil riset merupakan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 memiliki nilai-nilai Pancasila ialah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan serta keadilan. Nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan serta keadilan, tidak hanya disebutkan secara eksplisit dalam sebagian pasal, pula tersirat dalam pasal-pasal tersebut. Nilai ketuhanan serta kesatuan tersirat dalam sebagian pasal. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan bencana alam di Cianjur, Jawa Barat yang memakan korban yang tidak sedikit disertai dengan kerusakan yang luar biasa. Serta aksi ini diwujudkan dalam aktivitas penanggulangan bencana mulai dari prabencana, dikala paham darurat, serta pascabencana. Bencana alam tiba tanpa terdapatnya pemberitahuan maupun bisa diprediksi lebih dahulu.

Pancasila terdiri dari 5 (lima) sila yang mempunyai arti sangat berarti untuk kehidupan bernegara. Pancasila merupakan pengetahuan hidup serta pemikiran hidup bangsa. Dengan terdapatnya pancasila tujuan kehidupan bisa jadi terencana dengan mengamalkan nilai-nilai yang tercantum di dalamnya. Pancasila dalam rumusan sila-silanya sudah membagikan konsep ketuhanan, alam, serta manusia yang berdampingan serta tidak bisa dipisahkan².

Apalagi Indonesia adalah negara keluarga. Dalam negara keluarga, hak individu (termasuk hak milik) diakui atau hak asasi manusia. Namun, tapi tetap disukai nasional (kepentingan bersama), bukan kepentingan individu. Dengan Di sisi lain, hal ini sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia paguyuban yang kental, namun di sisi lain juga Negara hukum Pancasila berusaha untuk menciptakan mereka Harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) menyerahkannya kepada negara kesempatan untuk campur tangan diperlukan bagi terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Sesuai dengan asas Pancasila. Selanjutnya, Indonesia adalah negara yang taat hukum asas kepastian dan keadilan yang tinggi. Sifatnya prismatic kemudian konsep negara hukum pancasila dalam litigasi baik dalam pendiriannya maupun dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan menggabungkan prinsip keadilan dan konsep dan yurisdiksi lain, seperti common law dan rule of law.

Pancasila juga muncul sebagai upaya untuk melestarikan dan mencerminkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat (hukum kehidupan) dan sekaligus positif untuk memenuhi hukum yang hidup untuk mendorong dan membimbing sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, pengembangan dan penguatan legislasi nasional didasarkan pada asas hukum yang netral dan universal, dengan pengetahuan bahwa itu harus memenuhi persyaratan yang paling penting, yaitu (a) Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; (b) Berdasarkan nilai yang dapat diterima oleh

² Admin. (2019). *Wawasan Kebangsaan (4 Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara)*. Kesbangpol Banten Prov.

semua kepentingan dan tidak diskriminatif menentukan kelompok atau kelas tertentu; (c) Untuk memprioritaskan prinsip gotong royong dan toleransi; dan (d) Visi misi yang sama, tujuan yang sama dan orientasi yang sama diikuti dengan rasa saling percaya. pengertian negara hukum yang menjadi jargon pula adalah negara hukum pan-asil dengan tanda-tanda khusus yang lahir dan dibesarkan oleh masyarakat Indonesia. Adapun ciri negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Negara hukum Pancasila berupaya menciptakan keselarasan dan keseimbangan antar kepentingan pembayaran individu dan nasional (masyarakat) kepada negara kemampuan untuk campur tangan selama diperlukan untuk memulihkan ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menurut prinsip-prinsip Pancasila;
2. Indonesia adalah negara yang legal dan adil;
3. Bangsa yang religious;
4. Integrasi hukum sebagai instrumen untuk mengubah masyarakat dan hukum sebagai cerminan budaya masyarakat.

Berdasarkan kajian latar belakang yang telah dijelaskan diatas. Penulis memberikan batasan terkait dengan permasalahan agar penelitian dapat fokus dan menjawab tuntas, yaitu (1) Bagaimana negara hukum Pancasila sebagai pedoman dalam menyinergikan seluruh komponen bangsa dan (2) Bagaimana peran nyata seluruh komponen bangsa dalam menanggulangi bencana alam Gempa Cianjur.

PEMBAHASAN

A. Negara Hukum Pancasila sebagai Pedoman dalam Menyinergikan Seluruh Komponen Bangsa

Negara hukum Pancasila adalah negara hukum karena menurut Pasal 1 (3) UUD 1945, "Indonesia adalah negara hukum", yang berarti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara setiap orang harus selalu didasarkan pada pertimbangan hukum. Negara hukum Pancasila menawarkan sinergi dengan bagian-bagian bangsa. mempercepat bencana alam. Karena fenomena ini membutuhkan perhatian khusus dan juga negara kita mengikuti ideologi negara Pancasila, di mana 5 sila negara dinyatakan dan dinyatakan bahwa dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, tata nilai adalah nilai-nilai yang mengutamakan ketertiban, kasih sayang, dan gotong royong tanpa membeda-bedakan atau apapun³.

Negara seharusnya tidak hanya bungkam terhadap fenomena tersebut, tetapi bekerja sama dengan para ahli yang mumpuni yang lebih mengetahui bidangnya, tidak hanya dengan para ahli, tetapi bersama dengan lembaga terkait pula untuk menghadapi bencana secara langsung. yang juga merupakan salah satu tugas tentara tidak hanya dalam peperangan tetapi juga dalam menghadapi bencana alam (UU No. 34/2004, urusan 2). Melihat perkembangan situasi akibat bencana tersebut, pemerintah kembali mengundangkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana RI nomor 24 tahun 2007. Undang-undang ini dibuat untuk mengatasi kurangnya koordinasi antar sektor dan memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani masalah kebencanaan yang pada aplikasi diharapkan dapat melaksanakan bencana yang efektif secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi, dimana salah satunya adalah Membuat peta rawan bencana, menghutankan kembali hutan dan menanam bakau, membangun bangunan tahan gempa

³ BNPB Editorial. (2019). *Sinergitas Komponen Bangsa Mempercepat Penanganan Bangsa*. BNPB.

dan memberikan saran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penanggulangan bencana dan memberikan landasan hukum bagi pemangku kepentingan untuk bekerja sesuai peran dan tanggung jawab serta kewenangannya bahwa segala tindakan yang dilakukan dapat berhasil dan mencapai hasil yang optimal. Seiring perkembangan situasi akibat bencana, pemerintah kembali memberlakukan Undang-Undang Penanggulangan Bencana RI No.24 tahun 2007. Undang-undang ini dibuat untuk menghilangkan kesenjangan koordinasi antar sektor dan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani masalah kebencanaan, yaitu, apabila diterapkan, diharapkan dapat memberikan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Jika salah satunya mengatur kesiapsiagaan bencana, langkah awal penanggulangan bencana adalah mengurangi dampak negatif bencana melalui berbagai kegiatan seperti:

Pembuatan peta risiko bencana, penghijauan hutan dan penanaman bakau, pembuatan bangunan tahan gempa, dan memberikan saran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara memiliki hakikat dan pengaruh yang kuat terhadap seluruh komponen bangsa Indonesia. Para pendiri negara memilih Pancasila sebagai ideologi negara karena mengandung nilai dan norma yang menjadi pedoman masyarakat. Dibentuk oleh panitia beranggotakan sembilan orang yang disebut Piagam Piagam, inilah awal lahirnya Pancasila. Kita dapat melihat bahwa Pancasila dirumuskan oleh para pelopor dari berbagai ras, latar belakang dan kepentingan yang ingin menyatukan pikiran dan pendapatnya. Pancasila tidak sebatas pedoman, tetapi merupakan kunci keberhasilan bangsa Indonesia, implementasinya dapat dilihat dalam cara hidup masyarakat yang berdasarkan gotong royong, menganut sikap toleransi, dan sikap mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Pancasila sebagai dasar negara memiliki hakikat dan pengaruh yang kuat terhadap seluruh komponen bangsa Indonesia.

Kegiatan Konkrit yang dapat dilakukan negara pascasila untuk mensinergikan komponen negara adalah dengan membangun rasa bela negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki esensi dan pengaruh yang kuat bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Ibarat manusia dengan roh, begitu pula Pancasila dengan Bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari kata “Panca” yaitu 5 dan “sila” yaitu dasar. Dalam Pancasila terdapat butir-butir yang menyatukan bangsa Indonesia. Termaktub dalam sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai makna bahwa Indonesia adalah suatu bangsa yang tiap-tiap penduduknya bebas untuk memeluk agama dan aliran kepercayaannya. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 29 (2) UUD 1945. Para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai ideologi bangsa karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman masyarakat. Terbentuk oleh panitia Sembilan yang dikenal dengan Piagam Charter sebagai awal mula lahirnya Pancasila. Bisa kita lihat dari para pelopornya yang terdiri dari berbagai suku, latar belakang, dan kepentingan yang berbeda, mau menyatukan pemikiran dan pendapatnya sehingga dirumuskan oleh Pancasila. Pancasila bukan hanya sebatas pedoman, tapi merupakan kunci suksesnya bangsa Indonesia. Pengimplementasiannya bisa dilihat dari pola kehidupan masyarakatnya mulai dari gotong royong, sikap menjunjung toleransi, mengutamakan kepentingan kelompok diatas kepentingan pribadi.

Dalam realitas lapangan, Pancasila penting dan menjadi jiwa dari bangsa Indonesia karena dengan itu lah Bangsa ini bisa bertahan dan dikenal oleh bangsa luar. Bangsa Indonesia dalam melaksanakan aktivitas selalu memperhatikan aspek Pancasila terkhusus

membantu negara lain⁴. Seperti halnya dalam kerja sama dengan negara lain, Indonesia baru-baru ini mengadakan forum internasional G20 dengan mengundang para pemimpin dunia di Bali. Dari pertemuan tersebut, Indonesia dan pemimpin negara lain membahas isu-isu global salah satunya dibidang ekonomi. Dari contoh tersebut, dapat ditarik suatu point dimana Indonesia sudah menerapkan Pancasila yaitu membicarakan bagaimana pandangan negara-negara G20 untuk meningkatkan ekonomi yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut memberi manfaat bagi rakyat Indonesia karena akan ada solusi dan kebijakan yang diberlakukan dalam hal pemulihan ekonomi negara dan memiliki pengaruh positif kepada rakyat.

Ada beberapa isu ketika masa orde lama yakni pada Era Soekarno dimana Muncul PKI (Partai Komunis Indonesia) yang eksis di Indonesia untuk menggantikan ideologi Pancasila. Hal ini menjadi perhatian serius bagi para pemimpin saat itu karena akan terjadi konflik besar. Maka, peristiwa G30s/pki menjadi saksi pertumpahan darah bagi jenderal besar Indonesia dan beberapa rakyat Indonesia yang ikut menjadi korban akibat peristiwa tersebut. Walaupun komunisme sudah tidak eksis di Indoensia, kita sebagai rakyat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya beberapa paham yang merusak bangsa Indonesia. Seiring berjalan nya waktu, Pancasila mulai redup dan hilang dari jati dari bangsa. Kita bisa melihat dari sikap generasi bangsa yang mana mereka tidak mengenal lagi esensi Pancasila. Ramah tamah dan gotong royong sudah terjadi perubahan dan lambat laun diganti menjadi sikap individualisme dan hal ini sangat bertentangan dengan sila 3 butir Pancasila. Menghargai dan tolong menolong pun sudah tidak diindahkan, contohnya pada lingkup dunia pendidikan saja diciderai oleh adanya perbuatan bullying terhadap teman sekelas yang masif.

Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang berpendidikan, berintegritas, dan bertanggung jawab harus melakukan tindakan persuasif kepada generasi berikutnya untuk menanamkan kepada Pancasila dalam diri mereka. Karena oleh mereka nanti nya bangsa Indonesia akan diteruskan. Apabila akar/dasar nya sudah hancur maka daun yang dihasilkan pun akan hancur juga

B. Peran Nyata Seluruh Komponen Bangsa dalam Menanggulangi Bencana Alam Gempa Cianjur

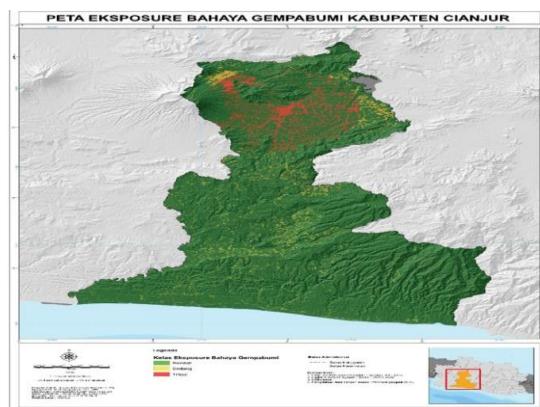
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang penanggulangan bencana, menjelaskan pada Pasal 1 ayat 2 bahwasannya, “Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.” Bencana alam yang terjadi diikuti dengan kompleksnya permasalahan, seperti dampak psikologis yang luar biasa, korban jiwa yang tidak sedikit, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan. Ditambah dengan mayoritas masyarakat yang belum siap dan paham mengenai antisipasi bencana yang terjadi, menjadikan penanggulangan bencana belum berjalan dengan maksimal.

Dalam beberapa hari ini, Indonesia sedang berduka dengan terjadinya Gempa Cianjur yang dimulai pada tanggal 21 November 2022. Gempa tersebut mengakibatkan kerusakan dan korban yang luar biasa. Menurut pembaruan data gempa bumi Cianjur per tanggal 28 November 2022 pukul 17.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat),

⁴ Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'Adalah*, Vol. 4 No. 2, pp. 39-44.

rumah rusak sebesar 63. 229 unit, meninggal dunia sebanyak 323 jiwa, orang dalam pencarian sebanyak 9 jiwa, luka dirawat yaitu 108 jiwa, dan yang mengungsi sebesar 100.330 Jiwa⁵.

Gambar 1: Peta Kerawanan Gempa Bumi Cianjur



Sumber: Kusmajaya, & Wulandari, 2019.

Berdasarkan peta diatas, daerah yang menjadi kerawanan tinggi atas gempa cianjur terletak pada daerah padat penduduk. Hal ini dengan mempertimbangkan 3 (tiga) unsur penting, yaitu eksposur, kerentanan, dan bahaya yang timbul. Alhasil diperoleh data, yaitu daerah yang berpotensi bahaya kelas tinggi sebesar 164, 98 Ha, kelas sedang sebesar 143.186,89 Ha, dan kelas rendah sebesar 218. 083,11 Ha. Selanjutnya, daerah yang memiliki kerentanan untuk terjadinya gempa kelas tinggi sebesar 10.827, 07 Ha, kelas sedang sebesar 19.966,98 Ha, dan kelas rendah sebesar 330.640,93 Ha. Selanjutnya, daerah yang memiliki eksposur dipengaruhi oleh kedekatan dengan pusat pemerintahan, yaitu tingkat tinggi dengan luas 13.152,59 Ha, sedang 5.280,25, dan rendah 343.002,23 Ha⁶.

Analisis yang telah dikaji pada 2019 tersebut, seharusnya sudah menjadi perhatian oleh masyarakat sekitar dan pemerintahan terkait. Namun hingga tahun 2022 ini, kesiapan masyarakat dan infrastruktur yang belum siap akan adanya bencana alam tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerugian yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kesuksesan penanggulangan bencana alam diperlukan adanya kesiapsiagaan dan peran nyata seluruh komponen bangsa untuk cepat serta tepat dalam menangani suatu bencana alam yang bersifat mendadak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang penanggulangan bencana dan negara hukum pancasila yang memiliki tujuan melindungi dan mensejahterakan warga bangsa Indonesia.

⁵ BNPB Editorial. (2022). *Update Bencana Gempabumi Cianjur 2022*. BNPB.

⁶ Sumardani Kusmajaya., & Wulandari, R. (2019). Kajian Risiko Bencana Gempabumi Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol. 10 No. 1, pp. 39-51.

Gambar 2: Lokasi Gempa Cianjur yang Mengakibatkan Longsor



Sumber: BNPB, 2022.

Aktualisasi nilai gotong royong yang tercantum dalam dasar negara kita Pancasila, telah dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak gempa Cianjur. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dalam hal ini memberikan terbaik bagi pemulihan kesehatan korban, dengan menyediakan fasilitas dan seluruh kemampuannya. Berbagai rumah sakit terdekat yang saat ini telah menerima pasien sebesar 699 orang dengan jumlah korban operasi yang mencapai 112 orang. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat yang telah mendata mengenai aset rumah yang rusak sebesar 958⁷. Begitu juga dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia), yang mengerahkan kemampuan serta alutsistanya sebagai dukungan untuk digunakan membantu masyarakat sekitar.

Gambar 3: Penggalangan Dana oleh BEM FH UNNES



Sumber: BEM Fakultas Hukum UNNES, 2022.

Begitu juga dengan mahasiswa yang memiliki peran sebagai generasi emas penerus bangsa, Badan Eksekutif Mahasiswa FH UNNES melakukan aksi solidaritas kemanusiaan sebagai bentuk pelaksanaan sila ke- 2 Pancasila. Terlebih, setiap orang yang terkena bencana alam berhak mendapatkan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2007. Namun, ada sebagian korban gempa Cianjur yang belum mendapatkan bantuan

⁷ BNPB Editorial. (2022). *Update Bencana Gempabumi Cianjur 2022*. BNPB.

tersebut. Akibat dari ketidakmerataan bantuan tersebut, maka Muhamdijir Effendy sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia terus melakukan penyisiran agar bantuan tersalurkan secara merata⁸. Sebagai bentuk dukungan akan hal tersebut dan pelaksanaan tugas keamanan, Polri juga menyediakan pengawalan atas penyampaian bantuan kepada korban secara gratis atau tanpa dipungut biaya untuk meminimalisir hal-hal yang diluar dugaan.

PENUTUP

Menurut pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, yang pertama, bahwasannya negara hukum Pancasila sebagai pedoman dalam mensinergikan seluruh komponen bangsa mempunyai andil atau peran yang sangat mendasar dan sangat penting. Nilai-nilai dan aspek-aspek penting yang terkandung dalam pancasila, dituangkan dalam hukum positif Indonesia, khusunya dalam lingkup penanggulangan bencana. Ketuhanan, kemanusian, persatuan, peran pemerintah, hingga keadilan yang bersandar pada kebudayaan sangat ditekankan dalam negara hukum Pancasila. Sehingga, kendala dan masalah apapun yang terjadi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu menjadi tanggung jawab bersama dan seluruh komponen bangsa bersinergi demi kesejahteraan masyarakatnya.

Kedua, peran nyata seluruh komponen bangsa dalam menanggulangi bencana alam gempa cianjur telah dilaksanakan dengan cara gotong royong. Sinergitas yang menjadi kunci, diaktualisasikan oleh pemerintah, lembaga terkait, mahasiswa hingga warga sekitar, seperti Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab atas pulihnya korban, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi informasi utama terkait gempa cianjur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat yang mendata kerusakan aset rumah, TNI-Polri bersama masyarakat yang membantu pencarian hingga penyaluran bantuan, Mahasiswa, dan Kemenko PMK telah mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk membantu korban pulih dan terpenuhi hak-hak dasarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta hak kemanusiaan yang dijamin oleh Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Hardi Warsono., & Buchari, A. (2019). *Kolaborasi Penanganan Bencana*. Bandung: Trim Komunikata.

SUMBER LAIN:

Sulistian, J., et. al. (2022). Sinergitas TNI Dan BNPB Dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Di Palu Guna Meningkatkan Pertahanan Nirmiliter Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 8, Januari, pp. 2841-2848.

Erlinawati. (2020). Nilai Pancasila Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. *Pancasila And Law Review*, Vol. 1 Issue 1, Januari-June, pp. 59-70.

Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'Adalah*, Vol. 4 No. 2, pp. 39-44.

Harmain, R., et. al. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Korban Bencana Alam (Kajian Yuridis Atas Undang-Undang Nomor

⁸ Kemenko PMK. (2022). *Sisir Korban Gempa Cianjur yang Belum Terbantu*. Kemenko PMK.

- 24 Tahun 2007 Tentang Penangulangan Bencana). *Lex Crimen*, Vol. X No. 11, Oktober, pp. 114-122.
- Agus Subagyo., & Rusfiana, Y. (2018). Sinergi TNI Angkatan Darat Dengan Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Transformasi*, Vol. 10 No. 2, Oktober, pp. 131-141.
- Sumardani Kusmajaya., & Wulandari, R. (2019). Kajian Risiko Bencana Gempabumi Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol. 10 No. 1, pp. 39-51.
- Rustam, R. (2018). *Kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Human Initiative. (2022). *Sitrep I Gempa Bumi Cianjur, Jawa Barat*. Cianjur: Human Initiative.
- TBNews. (2022). *Ratusan Personel Dikerahkan, Polri Bantu Gempa Cianjur*. TribrataNews.
- Teguh, R. (2022). *Pakar ITB: Sesar Cimandiri Jadi Pemicu Gempa Cianjur*. Portal Jabar Prov Go Id.
- Kemenko PMK. (2022). *Sisir Korban Gempa Cianjur yang Belum Terbantu*. Kemenko PMK.
- Pen Lanud Hsn. (2022). *TNI AU Berikan Bantuan Korban Gempa Cianjur*. TNI Angkatan Udara.
- Admin TNI AD. (2022). *Gunakan Rantis Atav, Tim Kesehatan TNI AD Tembus Kampung Terisolasi Gempa Cianjur*. TNI Angkatan Darat.
- BNPB Editorial. (2022). *Update Bencana Gempabumi Cianjur 2022*. BNPB.
- Pusdatin. (2021). *Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Begini Penjelasannya*. BPIP RI.
- Admin. (2019). *Wawasan Kebangsaan (4 Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara)*. Kesbangpol Banten Prov.
- BNPB Editorial. (2019). *Sinergitas Komponen Bangsa Mempercepat Penanganan Bangsa*. BNPB.
- BNPB Editorial. (2017). *Penanggulangan Bencana Berlandaskan Pancasila*. BNPB.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Biro Hukum Dan Organisasi BMKG.